



Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Nagrog, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya

Bagas Lanang Smesta^{1*}, Ute Lies Siti Khadijah², Kasno Pamungkas³

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Dipati Ukur, Bandung, Indonesia

Email: bagas23004@mail.unpad.ac.id¹, ute.lies@unpad.ac.id², kasno.pamungkas@unpad.ac.id³

Alamat: Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung

Korespondensi penulis: bagas23004@mail.unpad.ac.id

Abstract. *This research explores the role of the Nagrog Village Government in advancing the Nagrog Tourism Village located in Cipatujah District, Tasikmalaya Regency. Utilizing a qualitative approach with a case study method, data were gathered through in-depth interviews, direct observations, and literature reviews. The study's results indicate that the Nagrog Village Government holds a pivotal role in the tourism village's development by improving coordination with Pokdarwis and BUMDes, implementing Village Regulations (Perdes) as a legal framework, and enhancing tourism-related infrastructure. Despite these efforts, challenges persist, including the lack of long-term development plans, insufficient support for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), and ineffective promotional strategies. While the management of Tonjong Canyon as the main attraction has positively influenced the local economy, its contribution to Village Original Income (PAD) remains minimal. To achieve sustainable tourism village development, it is crucial to strengthen strategic planning, maximize digital marketing efforts, and improve MSME support.*

Keywords: *Village Government, Tourism Village, Tonjong Canyon, Community Empowerment, Tourism Development.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Nagrog dalam pengembangan Desa Wisata Nagrog di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Nagrog memiliki peran strategis dalam pengembangan desa wisata dengan memperkuat koordinasi bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menetapkan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum, serta membangun infrastruktur pendukung pariwisata. Namun, pengembangan desa wisata masih menghadapi tantangan seperti tidak adanya perencanaan jangka panjang, dukungan yang terbatas terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta strategi promosi yang belum optimal. Pengelolaan Tonjong Canyon sebagai destinasi unggulan berdampak positif terhadap perekonomian lokal, meskipun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) belum signifikan. Penguatan perencanaan strategis, optimalisasi promosi digital, dan peningkatan dukungan bagi UMKM menjadi hal penting untuk mencapai pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Desa Wisata, Tonjong Canyon, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Pariwisata.

1. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian suatu negara (Agyeiwaah, 2020). Tahun 2022, sektor pariwisata di Indonesia menyumbang sekitar USD 6,8 miliar dalam bentuk devisa, dan berkontribusi sebesar 3,6% terhadap PDB negara (OECD, 2024). Selain itu, pariwisata juga berdampak pada pelestarian budaya (Tahiri et al., 2022), keseimbangan lingkungan (Deb et al., 2023), dan peningkatan kualitas sosial masyarakat (Ariya et al., 2020).

Pascapandemi COVID-19, terjadi pergeseran tren pariwisata dari pariwisata massal ke pariwisata alternatif yang lebih menekankan pada pelestarian alam, lingkungan, dan budaya (Fragkou, 2021; Triarchi & Karamanis, 2017; Vainikka, 2016). Desa wisata muncul sebagai solusi inovatif untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pengelolaan potensi lokal berbasis prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan (Andereck & Nyaupane, 2011; Su et al., 2018; Su et al., 2019).

Perkembangan desa wisata di Indonesia menunjukkan tren positif. Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat bahwa jumlah desa wisata yang terdaftar dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta) meningkat signifikan dari 1.831 desa pada tahun 2021 menjadi 3.419 desa pada 2022 dan mencapai 4.573 desa pada 2023 (Kemenparekraf, 2024). Transformasi desa menjadi destinasi wisata dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif jika dikelola secara berkelanjutan (Andari et al., 2024). Meskipun pengembangan desa wisata seringkali dihadapkan pada potensi konflik sosial, seperti ketidaksepakatan antar pemangku kepentingan dan ketegangan dalam pengelolaan sumber daya (Wang & Yotsumoto, 2019), di sisi lain, peran pemerintah terkadang justru menjadi hambatan dalam proses pengembangan akibat birokrasi yang kompleks, kurangnya koordinasi, atau kebijakan yang tidak adaptif terhadap kebutuhan lokal (Luo et al., 2016; Ruhanen, 2013; Situmorang et al., 2019).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata, baik secara umum (Koopmans et al., 2018; Park et al., 2016) maupun dalam konteks desa wisata secara khusus (Amerta, 2017; Liu et al., 2020). Melalui kebijakan dan program yang terstruktur, pemerintah membantu percepatan pengembangan pariwisata, baik melalui pembangunan fasilitas, promosi destinasi, maupun kolaborasi dengan berbagai pihak seperti akademisi, sektor swasta dan masyarakat lokal (Purwanto, 2022).

Desa Nagrog di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan salah satu contoh pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2020, Desa Nagrog termasuk dalam kategori desa tertinggal. Namun, sejak 2021 hingga 2024, statusnya meningkat menjadi desa berkembang berkat pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah. Pada tahun 2022, Desa Nagrog ditetapkan sebagai desa wisata dengan Tonjong Canyon sebagai destinasi unggulan. Saat ini, Desa Nagrog berstatus sebagai desa wisata rintisan dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta) dan berhasil masuk dalam 45 besar Lomba Desa Wisata Nusantara pada tahun 2023.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten (McLennan et al., 2014), kajian

yang secara spesifik menyoroti peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata masih terbatas (Kodir et al., 2020; Putri et al., 2020). Padahal, keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat yang didukung oleh strategi dan kebijakan pemerintah desa (Wilson et al., 2001). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Nagrog, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.

2. KAJIAN TEORITIS

Desa Wisata

Berdasarkan pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, saat ini desa wisata atau *rural tourism* menjadi tren global dalam sektor pariwisata. Konsep desa wisata menawarkan pengalaman berlibur yang lebih menarik dan berbeda bagi para wisatawan. (Kemenparekraf, 2021). Desa wisata mengintegrasikan alam, budaya, dan masyarakat lokal dalam pengelolaannya. (Antara & Arida, 2015). Desa wisata bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan, pelestarian budaya, dan konservasi lingkungan (Gurvantry et al., 2022; Irhandayaningsih, 2019). Desa wisata adalah salah satu cara pengelolaan pariwisata di daerah pedesaan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan (Alfianto & Fauzi, 2021; Raharjana, 2012).

Desa wisata mengoptimalkan potensi alam dan budaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan (Okparizan et al., 2019; Ruwanti & Suwardi, 2020). Desa berpotensi menjadi destinasi wisata berbasis komunitas yang mengedepankan kearifan lokal serta mendorong ekonomi berlandaskan gotong royong dan keberlanjutan (Kemenkomarves, 2021). Konsep ini sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan, sesuai dengan amanat UUD 1945. Program ini bertujuan untuk mengembangkan desa-desa dengan potensi wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Gautama et al., 2020).

Berdasarkan Pedoman Desa Wisata 2021, pengembangan desa wisata di Indonesia dibagi menjadi empat kategori: Rintisan, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Klasifikasi ini ditetapkan oleh Perangkat Desa dan OPD terkait dalam dua tahun. Desa rintisan memiliki potensi namun terbatas dalam sarana dan partisipasi masyarakat, sehingga memerlukan pendampingan dan Dana Desa. Desa berkembang mulai dikenal dengan fasilitas dan aktivitas ekonomi yang tumbuh. Desa maju memiliki pengelolaan optimal, partisipasi masyarakat tinggi, dan diakui

luas. Desa mandiri menunjukkan inovasi, diversifikasi produk, pengakuan internasional, dan promosi berbasis digital.

Peran Pemerintah di Desa Wisata

Pemerintah memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Keterlibatan pemerintah didorong oleh harapan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi lokal, menyediakan peluang kerja yang lebih baik, memperbaiki infrastruktur, dan menarik investasi (Nunkoo & Ramkissoo, 2011). Keterlibatan pemerintah didukung luas karena memiliki mandat melindungi masyarakat, bersifat netral terhadap kepentingan komersial, memiliki kewenangan legislasi, dan tidak terikat pada tujuan keuangan jangka pendek seperti sektor swasta. (Ruhanen, 2013). Devine dan Devine (2011) menyatakan bahwa dominasi sektor swasta dalam perencanaan, promosi, dan pengelolaan pariwisata dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ketimpangan pembangunan infrastruktur, kemacetan di destinasi populer, serta kerusakan lingkungan akibat tekanan berlebih pada sumber daya alam.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata telah memberikan kontribusi positif bagi sektor pariwisata dalam pengembangan sektor sosial dan ekonomi (Koopmans et al., 2018; Purwanto, 2022; Rismianto et al., 2013). Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata dimulai dari investasi sumber daya, perencanaan kebijakan hingga promosi pariwisata (Park et al., 2016). Secara umum, pemerintah menciptakan iklim perekonomian. Ini memberikan berbagai aturan di mana industri pariwisata bekerja dan juga memainkan peran penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan promosi pariwisata (Liu et al., 2020).

Hall (2005) mengemukakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata melalui fungsi utama: koordinasi, perencanaan, legislasi dan regulasi, kewirausahaan, stimulasi dan promosi, peran sosial, dan perlindungan kepentingan publik. Dalam konteks desa wisata, koordinasi diperlukan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah di berbagai tingkatan dan pemangku kepentingan lokal. Perencanaan strategis membantu menentukan prioritas pembangunan infrastruktur dan promosi potensi wisata secara berkelanjutan. Legislasi dan regulasi memberikan kerangka hukum yang mendukung pengelolaan pariwisata, sementara pemerintah juga dapat bertindak sebagai pelaku usaha melalui penyediaan infrastruktur dasar. Fungsi stimulasi diwujudkan dengan memberikan insentif seperti pendanaan pelatihan dan pengembangan kapasitas komunitas lokal. Selain itu, peran sosial pemerintah terlihat dalam mendorong partisipasi masyarakat marginal untuk

meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui perlindungan kepentingan publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata, khususnya di Desa Nagrog. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara komprehensif proses, kebijakan, serta dinamika sosial yang terjadi dalam pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat (Creswell & David Creswell, 2018). Metode studi kasus dinilai relevan untuk mengkaji kompleksitas pengembangan desa wisata melalui investigasi terhadap berbagai program, kebijakan, dan peran aktor yang terlibat. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori Michael Hall (2005) tentang peran utama pemerintah dalam pengelolaan pariwisata, yaitu koordinasi, perencanaan, legislasi dan regulasi, kewirausahaan, stimulasi, peran sosial, dan perlindungan kepentingan publik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan tiga informan kunci, yaitu Sekretaris Desa, Ketua Pokdarwis, dan Ketua BUMDes, yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Nagrog. Observasi langsung dilakukan di lokasi wisata untuk mengamati proses pengelolaan, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan potensi lokal. Studi pustaka digunakan untuk mendukung analisis dengan merujuk pada dokumen resmi seperti Peraturan Desa (Perdes), SK Pokdarwis, dan data lainnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nagrog, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, yang memiliki potensi wisata alam unggulan, yaitu Tonjong Canyon. Selain itu, Desa Nagrog menawarkan berbagai paket wisata yang menggabungkan wisata alam dan budaya, seperti Green Tapen, Marak Lauk, Suhud Eling, Nyulap Kalapa, dan Pensil Ajaib, yang mendukung pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal. Pemilihan Desa Nagrog sebagai lokasi penelitian didasarkan pada statusnya sebagai desa wisata rintisan yang tengah berkembang dan diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan desa wisata berbasis masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Nagrog dalam Pengembangan Desa Wisata

Pemerintah Desa Nagrog memainkan peran penting dalam pengelolaan Desa Wisata Nagrog, terutama dalam mengoptimalkan potensi Tonjong Canyon sebagai destinasi unggulan. Penetapan status desa wisata pada tahun 2022 mendorong pemerintah desa untuk lebih aktif dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui pembangunan fasilitas secara mandiri menunjukkan model kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah.

Kolaborasi ini mengindikasikan pendekatan berbasis masyarakat yang menempatkan warga lokal sebagai pelaku utama. Pendekatan semacam ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki, tetapi juga memastikan keberlanjutan pengelolaan wisata melalui keterlibatan aktif komunitas. Meski demikian, kurangnya kapasitas teknis masyarakat dalam beberapa aspek dapat menjadi hambatan dalam pengembangan lebih lanjut.

Koordinasi

Pemerintah Desa Nagrog telah menjalin hubungan yang baik dengan Pokdarwis dan BUMDes, yang masing-masing memiliki peran dalam pengelolaan teknis dan promosi desa wisata. Namun, hubungan dengan pemerintah daerah tidak selalu berjalan lancar, terutama dalam hal dukungan teknis dan pelatihan.

Heri, Sekretaris Desa Nagrog, menyampaikan:

"Sebetulnya untuk kegiatan dalam rangka pengembangan Desa Wisata Nagrog, Pemerintah Desa selalu berkoordinasi baik dengan Pokdarwis ataupun BUMDes, namun kami terkadang kesulitan jika harus berurusan dengan mereka yang di atas (Pemerintah Daerah) apalagi perihal informasi pelatihan yang diberikan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Tasikmalaya."

Kurangnya koordinasi vertikal ini dapat menghambat pengembangan desa wisata, terutama dalam pengadaan pelatihan atau akses pendanaan. Keterbatasan ini mengindikasikan bahwa sinergi antar-tingkatan pemerintahan masih perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan wisata.

Perencanaan

Perencanaan pengembangan Desa Wisata Nagrog masih bersifat reaktif, tergantung pada alokasi anggaran tahunan. Beberapa pencapaian telah dilakukan, seperti perbaikan akses jalan menuju Tonjong Canyon dan pembangunan podium seni, tetapi belum ada rencana induk yang komprehensif untuk jangka panjang.

Heri, Sekretaris Desa Nagrog, menjelaskan:

"Saat ini untuk pengembangan Desa Wisata Nagrog masih terpaku pada Dana Desa, walaupun pengalokasiannya tidak besar, tetapi akses jalan menuju Tonjong, podium dan

sanggar sudah terbangun. Target di tahun ini (2024) sih pembangunan pasar desa, mudah-mudahan terealisasi."

Ketergantungan pada dana desa tanpa adanya perencanaan strategis berisiko menghasilkan pengembangan yang tidak berkelanjutan. Penyusunan rencana induk yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi langkah yang mendesak untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Legislasi dan Regulasi

Pengelolaan Desa Wisata Nagrog telah didukung dengan penerapan Peraturan Desa (Perdes) sebagai landasan hukum, pembentukan Pokdarwis melalui Surat Keputusan Kepala Desa, serta pengakuan resmi melalui Surat Keputusan Bupati. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata.

Heri, Sekretaris Desa Nagrog, menyebutkan:

"Kami sudah buat Perdes untuk mendukung pengelolaan desa wisata ini, termasuk pembentukan Pokdarwis dan pengakuan resmi dari bupati. Tapi, yang jadi masalah adalah tidak semua kebijakan diawasi secara rutin. Kadang hanya dibuat tapi pelaksanaannya kurang maksimal."

Meskipun regulasi telah disusun dengan baik, pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang konsisten untuk memastikan regulasi berjalan sesuai dengan tujuan awal. Tanpa pengawasan, kebijakan yang sudah diterapkan berisiko tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan pengelolaan.

Kewirausahaan

Upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan seperti pembuatan keripik, sandal ukir, dan kelapa ukir telah dilakukan. Namun, keterbatasan alokasi dana menjadi kendala utama yang menghambat kontribusi UMKM terhadap pengelolaan desa wisata.

Gian, Ketua BUMDes Nagrog, mengatakan:

"Kalau untuk permodalan UMKM sempat ada, tapi ke (budidaya) nila. Kalau untuk pendukung desa wisata paling pelatihan pembuatan keripik, sandal ukir, sama kelapa ukir, bisa buat oleh-oleh."

Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam alokasi dana, di mana sektor pendukung wisata seperti UMKM mendapatkan prioritas lebih rendah dibandingkan sektor lainnya. Dengan optimalisasi dukungan dana dan diversifikasi produk, UMKM dapat memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian desa wisata.

Stimulasi dan Promosi

Promosi Desa Wisata Nagrog masih dilakukan dengan cara konvensional, meskipun upaya digitalisasi telah dimulai melalui pembuatan website desa. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook juga sudah digunakan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Aom, Ketua Pokdarwis, menyampaikan:

"Akun media sosial seperti TikTok, Instagram serta Facebook kami sudah ada, namun pada pemanfaatannya belum optimal dikarenakan kesibukan anggota kami (Pokdarwis)."

Minimnya pemanfaatan media sosial menunjukkan perlunya pelatihan teknis bagi anggota Pokdarwis agar mereka mampu mengelola promosi digital secara efektif. Dengan strategi digital yang terarah, potensi desa wisata untuk menjangkau wisatawan lebih luas dapat tercapai.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, khususnya melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang berfokus pada pengembangan produk kuliner. Upaya ini menjadi langkah awal dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pariwisata. Namun, partisipasi masyarakat secara menyeluruh masih perlu diperkuat.

Pelibatan masyarakat secara aktif dan merata di seluruh lapisan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan desa wisata. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin kuat rasa memiliki dan komitmen untuk menjaga kelestarian desa wisata.

Perlindungan Kepentingan Publik

Pemerintah Desa Nagrog menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat lokal dengan menolak tawaran dari pihak luar yang berpotensi mengambil alih pengelolaan tiket masuk.

Heri, Sekretaris Desa, mengatakan:

"Setelah *Tonjong Canyon* masuk TV, diliput oleh *My Trip My Adventure* (salah satu program Trans TV), sempat ditawari kerja sama pengelolaan tiket, tapi yang menjaga tiketnya harus dari pihak sana. Jelas kami menolak."

Penolakan ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pengelolaan wisata tetap dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Kebijakan semacam ini juga mendukung prinsip keadilan dalam distribusi manfaat pariwisata.

Dampak Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan Desa Wisata Nagrog mulai memberikan dampak positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Peningkatan aksesibilitas menuju *Tonjong Canyon* dan pengelolaan yang melibatkan masyarakat telah membuka peluang usaha baru di sekitar kawasan wisata. Salah satu dampak langsung yang terlihat adalah munculnya warung di

sepanjang jalur menuju destinasi wisata serta semakin banyaknya masyarakat yang mendaftarkan rumah mereka sebagai homestay.

Heri, Sekretaris Desa, menjelaskan:

"Setelah perbaikan akses menuju Tonjong Canyon, ada masyarakat mulai berani mendirikan saung dagangan (warung berbentuk saung), bahkan masyarakat mulai ramai mendaftarkan rumahnya untuk homestay, meskipun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) belum signifikan."

Keberadaan warung dan homestay di Desa Wisata Nagrog mencerminkan peluang ekonomi baru dan meningkatnya partisipasi masyarakat, namun kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Optimalisasi sektor pariwisata memerlukan strategi yang lebih terarah. Selain itu, tanpa perencanaan tata ruang yang baik, peningkatan wisatawan berisiko menimbulkan konflik lahan dan tekanan lingkungan. Karena itu, pengelolaan berbasis keberlanjutan dengan prinsip kehati-hatian menjadi penting untuk meminimalkan dampak negatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Desa Nagrog memainkan peran strategis dalam pengembangan Desa Wisata Nagrog, terutama melalui pengelolaan potensi Tonjong Canyon sebagai destinasi unggulan. Berbagai langkah telah diambil, seperti koordinasi dengan Pokdarwis dan BUMDes, penetapan Peraturan Desa (Perdes), dan pembangunan infrastruktur pendukung. Upaya ini telah memberikan dampak positif pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih belum optimal.

Pengembangan Desa Wisata Nagrog menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya perencanaan strategis jangka panjang, terbatasnya dukungan bagi UMKM, serta strategi promosi yang masih konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemajuan telah dicapai, keberlanjutan pengelolaan desa wisata memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Keberlanjutan pengelolaan Desa Wisata Nagrog dapat didukung dengan perencanaan strategis yang terstruktur, optimalisasi promosi digital, peningkatan dukungan terhadap UMKM, dan penguatan partisipasi masyarakat. Pendekatan berbasis keberlanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi kunci untuk memaksimalkan dampak positif sektor pariwisata terhadap desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang hanya berfokus pada peran pemerintah desa. Penelitian di masa depan disarankan untuk mengeksplorasi kolaborasi

lintas sektor dan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dampak pariwisata terhadap ekonomi lokal dan pengelolaan lingkungan.

6. DAFTAR REFERENSI

- Agyeiwaah, E. (2020). Over-tourism and sustainable consumption of resources through sharing: the role of government. In *International Journal of Tourism Cities* (Vol. 6, Issue 1, pp. 99–116). Emerald Group Holdings Ltd. <https://doi.org/10.1108/IJTC-06-2019-0078>
- Alfianto, F. Y., & Fauzi, A. M. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Pakuncen. *Paradigma*.
- Amerta, I. M. S. (2017). The Role of Tourism Stakeholders at Jasri Tourism Village Development, Karangasem Regency. *International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)*, 1(2), 20. <https://doi.org/10.21744/ijssh.v1i2.32>
- Andari, R., Kusumah, A. H. G., & Ningsih, C. (2024). The Role of Local Champion in Achieving an Integrated Rural Tourism: A Case Study of Alamendah Tourism Village, West Java. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 11(3), 291–304. <https://doi.org/10.22500/11202350271>
- Andereck, K. L., & Nyaupane, G. P. (2011). Exploring the Nature of Tourism and Quality of Life Perceptions among Residents. *Journal of Travel Research*, 50(3), 248–260. <https://doi.org/10.1177/0047287510362918>
- Antara, M., & Arida, I. N. S. (2015). *Panduang Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal* (Pertama). Pustaka Larasan.
- Ariya, G., Sempele, C., & Simaloi, F. (2020). Local Maasai Women Empowerment Through Employment Opportunity: Lessons from Base Camp Maasai Brand in Maasai Mara, Kenya. In T. Baum & A. Ndiuini (Eds.), *Sustainable Human Resource Management in Tourism: African Perspectives* (pp. 143–155). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41735-2_11
- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edition). Sage.
- Deb, S. K., Das, M. K., Voumik, L. C., Nafi, S. Md., Rashid, M., & Esquivias, M. A. (2023). The Environmental Effects of Tourism: Analyzing the Impact of Tourism, Global Trade, Consumption Expenditure, Electricity, And Population on Environment In Leading

- Global Tourist Destinations. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 51(4 supplement), 1703–1716. <https://doi.org/10.30892/gtg.514spl11-1166>
- Devine, A., & Devine, F. (2011). Planning and developing tourism within a public sector quagmire: Lessons from and for small countries. *Tourism Management*, 32(6), 1253–1261. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.11.004>
- Fragkou, D. (2021). The Weakness of Mass Tourism in the Covid-19 Period and the Contribution of Architecture. *Springer Proceedings in Business and Economics*, 131–139. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66154-0_15
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>
- Gurvantry, D., Febriansah, A., & Tampubolon, J. (2022). Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata E kang di Kabupaten Bintan). *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(3), 174–178. <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.65>
- Hall, C. M. (2005). The Role of Government in the Management of Tourism: The Public Sector and Tourism Policies. In *The Management of Tourism* (pp. 218–231). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446214961.n15>
- Irhandayaningsih, A. (2019). Strategi Pengembangan Desa Gemawang Sebagai Desa Wisata Eko Budaya. *ANUVA*, 3(3), 283–290.
- Kemenkomarves. (2021). *Pedoman Desa Wisata*. (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
- Kememparekraf. (2021). *Membangun Ekosistem Desa Wisata Bersama Komunitas*. Kememparekraf/Baparekraf RI. <https://kememparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Membangun-Ekosistem-Desa-Wisata-Bersama-Komunitas>
- Kememparekraf. (2024). *Siaran Pers : Menparekraf Resmi Luncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024*. Kememparekraf/Baparekraf RI. <https://www.kememparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-resmi-luncurkan-anugerah-desa-wisata-indonesia-adwi-2024>
- Kodir, A., Ahmad, R., & Meiji, N. H. P. (2020). The dynamics access on tourism governance in wakatobi national park. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 32(4), 1376–1383. <https://doi.org/10.30892/GTG.32427-583>
- Koopmans, M. E., Rogge, E., Mettepenningen, E., Knickel, K., & Šūmane, S. (2018). The role of multi-actor governance in aligning farm modernization and sustainable rural development. *Journal of Rural Studies*, 59, 252–262. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.03.012>

- Liu, C., Dou, X., Li, J., & Cai, L. A. (2020). Analyzing government role in rural tourism development: An empirical investigation from China. *Journal of Rural Studies*, 79, 177–188. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.046>
- Luo, F., Moyle, B. D., Bao, J., & Zhong, Y. (2016). The role of institutions in the production of space for tourism: National Forest Parks in China. *Forest Policy and Economics*, 70, 47–55. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.05.021>
- McLennan, C. lee J., Ritchie, B. W., Ruhanen, L. M., & Moyle, B. D. (2014). An institutional assessment of three local government-level tourism destinations at different stages of the transformation process. *Tourism Management*, 41, 107–118. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.09.007>
- Nunkoo, R., & Ramkissoon, H. (2011). Developing a community support model for tourism. *Annals of Tourism Research*, 38(3), 964–988. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.01.017>
- OECD. (2024). *OECD Tourism Trends and Policies 2024* (OECD Tourism Trends and Policies). OECD. <https://doi.org/10.1787/80885d8b-en>
- Okparizan, Sumaryana, A., Muhafidin, D., & Suprayogi Sugandi, Y. (2019). Kapasitas Organisasi dalam Pengembangan Pariwisata Desa: Studi Kasus Desa Wisata Kabupaten Bintan. *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*. <http://www.kemdesa.id/>,
- Park, J. H., Lee, C., Yoo, C., & Nam, Y. (2016). An analysis of the utilization of Facebook by local Korean governments for tourism development and the network of smart tourism ecosystem. *International Journal of Information Management*, 36(6), 1320–1327. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.05.027>
- Purwanto, S. (2022). Analyzing the Role of Local Government in Tourism Village Development: An Empirical Investigation from Kampung Wisata Payo. In *Proceedings of the International Academic Conference on Tourism (INTACT) “Post Pandemic Tourism: Trends and Future Directions” (INTACT 2022)* (pp. 455–461). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-73-2_32
- Putri, A. E., Khadijah, U. L. S., & Novianti, E. (2020). Community Empowerment in The Development of Mangrove Tourism in Batu Karas of Pangandaran, West Java. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 31(3), 972–978. <https://doi.org/10.30892/gtg.3>
- Raharjana, D. T. (2012). Membangun Pariwisata Bersama Rakyat: Kajian Partisipasi Lokal dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau. *KAWISTARA*, 2(3), 22–2012.
- Rismianto, D. D., Rochmah, S., & Nurani, F. (2013). Strategy of the Local Government in Developing Tourism Sector to Increase the Local Revenue (PAD) (Study in Culture, Tourism, Youth and Sport Institution of Tulungagung). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5), 1033–1038.

- Ruhanen, L. (2013). Local government: Facilitator or inhibitor of sustainable tourism development? *Journal of Sustainable Tourism*, 21(1), 80–98. <https://doi.org/10.1080/09669582.2012.680463>
- Ruwanti, S., & Suwardi, N. (2020). Pemetaan Potensi Desa dalam Upaya Mengembangkan Desa Wisata di Desa Pengujan, Kabupaten Bintan. *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*. <http://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro>
- Situmorang, R., Trilaksono, T., & Japutra, A. (2019). Friend or Foe? The complex relationship between indigenous people and policymakers regarding rural tourism in Indonesia. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 39, 20–29. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.02.001>
- Su, L., Huang, S. (Sam), & Huang, J. (2018). Effects of Destination Social Responsibility and Tourism Impacts on Residents' Support for Tourism and Perceived Quality of Life. *Journal of Hospitality and Tourism Research*, 42(7), 1039–1057. <https://doi.org/10.1177/1096348016671395>
- Su, M. M., Wall, G., Wang, Y., & Jin, M. (2019). Livelihood sustainability in a rural tourism destination - Hetu Town, Anhui Province, China. *Tourism Management*, 71, 272–281. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.10.019>
- Tahiri, A., Kovaçi, I., & Trajkovska Petkoska, A. (2022). Sustainable Tourism as a Potential for Promotion of Regional Heritage, Local Food, Traditions, and Diversity—Case of Kosovo. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 14, Issue 19). MDPI. <https://doi.org/10.3390/su141912326>
- Triarchi, E., & Karamanis, K. (2017). Alternative Tourism Development: A Theoretical Background. *World Journal of Business and Management*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.5296/wjbm.v3i1.11198>
- Vainikka, V. E. (2016). Tourist guide reflections on the spatialities of mass tourism: A case study of Finnish package tourism in Crete. *Fennia*, 194(1), 64–78. <https://doi.org/10.11143/40925>
- Wang, L., & Yotsumoto, Y. (2019). Conflict in tourism development in rural China. *Tourism Management*, 70, 188–200. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.08.012>
- Wilson, S., Fesenmaier, D. R., Fesenmaier, J., & Es, J. C. Van. (2001). Factors for success in rural tourism development. *Journal of Travel Research*, 40(2), 132–138. <https://doi.org/10.1177/004728750104000203>